



NARASI 'PARTAI COKELAT' DALAM KLARIFIKASI MKD DPR RI

Baru dua bulan menduduki kursi DPR RI periode 2024-2029, sebanyak 3 anggota sudah dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Selasa (3/12/2024) hari ini untuk diminta klarifikasi. Salah satu yang menjadi buah bibir adalah panggilan untuk anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Yulius Setiarto. Ini merupakan imbas pernyataannya soal netralitas Polri di Pilkada 2024. Narasi 'Partai Cokelat' alias Parcoq mencuat usai Yulius mengunggah produk jurnalistik dari ulasan Bocor Alus Politik tentang dugaan cawe-cawe aparat kepolisian dalam Pilkada 2024 di akun pribadi TikTok-nya. Partai Cokelat sendiri merupakan istilah yang merujuk pada oknum polisi, ini berdasarkan warna baju dinas kepolisian berwarna cokelat. Parcoq sebenarnya juga muncul dalam statment Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Bahkan dalam siarannya, Hasto dengan gamblang menyebut Joko Widodo (Jokowi) memobilisasi Parcoq di wilayah Sumut, Jateng, dan Jawa Timur (Jatim). Di sisi lain, ada juga panggilan untuk anggota Komisi X DPR RI, Nuroji. Dia diduga membuat pernyataan mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) kala rapat dengan Kemenpora. Terakhir panggilan untuk anggota Komisi V Haryanto soal dugaan video ekshibisionisme yang viral di media sosial.

Baca Hal 11....

**Government
(Hal.2)
Prabowo Yakini
RI Tak Impor
Beras Tahun
2025**

PILKADA 2024

Asal Mula Istilah "Partai Coklat"

22/11/2024:

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pertama kali menyebut istilah "Partai Coklat" untuk menggambarkan kelompok simpatisan Joko Widodo yang diduga berupaya mengintervensi proses politik di Pilkada serentak.

25/11/2024:

Isu "Partai Coklat" kembali dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPR. Anggota DPR Fraksi NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo, mempertanyakan keterkaitan isu ini dengan netralitas institusi negara, termasuk kepolisian.

29/11/2024

Joko Widodo menanggapi isu "Partai Coklat," meminta bukti dan menyarankan laporan ke Bawaslu atau MK. Habiburokhman menyebut isu ini hoaks, karena pemilu melibatkan banyak partai.

03/12/2024

Anggota Komisi I DPR dari PDIP, Yulius Setiarto dipanggil MKD terkait pernyataannya soal netralitas Polri di Pilkada 2024, setelah mengunggah artikel tentang dugaan keterlibatan polisi di TikTok.

Prabowo Yakin RI Tak Impor Beras Tahun 2025

REALISASI PENGADAAN & PENYALURAN BERAS NASIONAL (2024)

PENGADAAN

REALISASI DN

- CBC : 727.148 Ton
- Komersial : 392.817 Ton
- TOTAL DN : 1.119.965 Ton

REALISASI ADA LN

2.846.076 ton

TOTAL (DN+LN)

3.966.041 ton

PENYALURAN

BANTUAN PANGAN 2024

- Tahap I : 659.352 Ton
- Tahap II : 653.482 Ton
- Tahap III : 440.898 Ton

REALISASI SHP

1.232.697 ton

TANGGAP DARURAT

381 ton

TOTAL

2.986.810 ton

Sumber : BPN



Presiden Prabowo Subianto (tengah) bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (ketiga kanan) menyalami para menteri Kabinet Merah-Putih (KMP) sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/12/2024). (Ant)

tidak akan impor beras lagi," kata Prabowo.

"Bahkan cadangan kita cukup. Walaupun ini berita yang sangat baik dan ini sekali lagi akibat kerja keras saudara, apresiasi saya juga kepada Menteri Pertanian dan timnya, Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), semua unsur Menteri BUMN dan BUMN yang berada di bawah pengawasan menteri BUMN terima kasih. Langkah-langkah kita di akhir tahun 2024 juga karena dukungan Presiden Joko Widodo sebelumnya, kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina," tambahnya.

Dia menuturkan bagaimana Indonesia mampu mengatasi musim kering, mampu menghadapi di tengah suasana geopolitik yang tidak ringan. Masalah geopolitik, ujarinya, berpengaruh dengan masalah pangan.

"Kalau terjadi suatu ketegangan dan krisis negara-negara yang biasanya ekspor pangan akan menghentikan ekspor mereka. Ini fenomena yang sudah terjadi berkali-kali karena itu terima kasih, Alhamdulillah, kita sekarang berada dalam posisi yang semakin kuat dan semakin ke depan kita akan tambah kuat di bidang ini," ucap Prabowo.

"Kita tidak nanti hanya bebas dari impor beras tapi kita harus bebas dari impor semua komoditas pangan," imbuhnya.

Prabowo juga menyoroti kinerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang memantau dan telah mampu mengendalikan inflasi.

Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras di tingkat penggilingan turun 3,79% secara year on year (YoY) pada November 2024.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widiasanti mencatat harga beras di tingkat penggilingan secara tahunan mengalami peningkatan sebesar 1,23% month to month (mtm) menjadi

Rp 12.567 per kilogram. Sementara secara yoy harga beras di tingkat penggilingan meningkat sebesar 3,79%.

Amalia juga menyebutkan tingkat inflasi beras di tingkat grosir dan eceran pada November 2024. Pada tingkat grosir terjadi deflasi 0,81% mtm, namun secara yoy mengalami inflasi sebesar 0,54%. Kemudian di tingkat eceran terjadi deflasi 0,45% secara mtm an terjadi inflasi sebesar 2,80% secara yoy.

"Harga beras yang dimaksud adalah rata-rata harga beras yang mencakup berbagai kualitas beras di seluruh wilayah Indonesia," jelas Amalia dalam Konferensi Pers, Senin (2/12/2024).

Sementara untuk rata-rata harga gabah di tingkat petani pada November yaitu gabah kering panen (GKP) tercatat menurun sebesar 1,86% mtm menjadi Rp 6.303 per kilogram dan turun 6,18% secara yoy. Kemudian untuk gabah kering giling (GKG) Amali mencatat mengalami penurunan sebesar 1,48% mtm menjadi Rp 6.5984 dan turun 8,00% yoy.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2024 mencatatkan inflasi 0,03% secara bulanan atau month to month (MtM). Pada November ini terjadi kenaikan IHK dari 106,01 pada Oktober 2024 menjadi 106,33 pada November 2024.

Sementara itu, secara tahunan terjadi inflasi sebesar 1,55% atau secara tahun kalender November 2024. Sementara itu, inflasi secara year to date sebesar 1,12%.

Bantuan Pangan Dilanjutkan

Pemerintah juha bakal melanjutkan pemberian bantuan pangan berupa 10 kilogram (kg) beras pada bulan Januari - Februari 2025

nanti. Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) hal itu dilakukan untuk memitigasi defisit produksi beras.

"Saya sudah ratas kita melihat produksi beras tahun 2021, 2022, 2023 kita bandingkan dengan 2024, Januari itu kita ada shortage produksi," kata Zulkifli Hasan, di Kompleks Parlemen, Senin (2/12/2024).

Zulhas mengatakan produksi beras di Januari 2024 diperkirakan di bawah 1,5 juta ton, sedangkan kebutuhannya mencapai 2,6 juta ton. Kemudian pada bulan Februari produksi diperkirakan 2 juta ton, sedangkan kebutuhan diperkirakan 2,6 juta ton.

"Saya sudah ratas dipimpin presiden langsung sudah diputuskan akan ada bantuan pangan nanti untuk 16 juta orang, sebanyak 160 ribu ton di Januari dan 160 ribu ton di Februari," kata Zulhas.

Selain itu, ungkap Zulhas, nantinya pemerintah juga akan menggelar operasi pasar untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras pada tahun 2025 nanti. Sebanyak 150 ribu ton beras SPHP digelontorkan di bulan Januari dan 150 ribu ton lagi di Februari.

"Dengan begitu Bulog stoknya akan berkurang dan nanti pada Maret-April akan panen raya. Bulog harus membeli gabah karena panen itu akan datang 3 juta lebih. Oleh karena itu Maret-Mei Bulog harus membeli kira-kira hampir 2 juta gabah petani," kata Zulhas.

Untuk anggaran, dialokasikan untuk bantuan sosial dan operasi pasar itu mencapai Rp 6 triliun, yang diambil dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN).

Sebelumnya Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan jumlah penerima bantuan pangan berupa beras 10 kilogram diturunkan menjadi 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari sebelumnya mencapai 22 juta KPM.

Penurunan ini dilakukan karena ada sudah ada program bantuan pemerintah lainnya termasuk makan Bergizi Gratis.

"Karena kan sudah Makan Bergizi Gratis, dan pasti harusnya ter-cover oleh beberapa kegiatan lainnya," kata Arief, Rabu (6/11/2024).

Anggaran yang dibutuhkan untuk bantuan pangan ini sebesar Rp 5,1 triliun, yang diharapkan bisa menekan tingkat inflasi.

"Urgensinya adalah pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari inflasi. Jadi pada saat beras menjadi kontributor inflasi kita harus melakukan intervensi," kata Arief. (din, ist, wid, rls/dya)

Banggar DPR Restui Anggaran 7 Kemenko Ditambah Rp 5 T Minta Waktu 3 Bulan untuk Pembahasan

Rincian perubahan usulan anggaran TA 2025 dari pagu anggaran awal tiap Kemenko di rancangan DIPA APBN TA 2025

- **Kemenko Pangan**
Pagu anggaran: Rp 44.089.025.000
Anggaran tambahan: Rp 505.910.975.000
Menjadi: Rp 550.000.000.000
- **Kemenko Pembedayaan Masyarakat**
Pagu anggaran: Rp 139.727.234.000
Anggaran tambahan: Rp 653.772.765.000
Menjadi: Rp 793.500.000.000
- **Kemenko Perekonomian**
Pagu anggaran: Rp 459.766.254.000
Anggaran tambahan: Rp 64.209.800.000
Menjadi: Rp 523.976.054.000
- **Kemenko Polkam**
Pagu anggaran: Rp 268.281.288.000
Anggaran tambahan: Rp 3.000.000.000.000
Menjadi: Rp 3.268.281.288.000
- **Kemenko PMK**
Pagu anggaran: Rp 111.241.324.000
Anggaran tambahan: Rp 360.337.151.000
Menjadi: Rp 471.578.475.000
- **Kemenko Kumham Imipias**
Pagu anggaran: Rp 9.029.527.000
Anggaran tambahan: Rp 325.000.000.000
Menjadi: Rp 334.029.527.000
- **Kemenko Infrastruktur**
Pagu anggaran: Rp 230.000.000.000
Anggaran tambahan: Rp 273.143.736.000
Menjadi: Rp 503.143.736.000



Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) sebesar Rp 64,20 miliar.

Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 3 triliun dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebesar Rp 360,33 miliar.

Selanjutnya, usulan penambahan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Kemenko Kumham Imipias) sebesar Rp 325 miliar dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) sebesar Rp 273,14 miliar.

Dengan demikian, total permintaan tambahan anggaran TA 2025 dari ketujuh Kemenko tersebut sebesar Rp 5.182.374.427.000.

Usulan anggaran tambahan itu akhirnya disetujui oleh Banggar DPR RI pada Rapat Kerja Banggar bersama para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2024). "Ini kami setujui dan kami meminta waktu dibahas dengan pemerintah dengan rentan waktu tiga bulan, dapat disetujui?" ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

Pertanyaan tersebut langsung disambut oleh anggota Banggar dan anggota raker "Setuju," jawab para peserta raker.

Selanjutnya, usulan yang telah disetujui ini akan dibahas oleh DPR RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Kami minta waktu untuk dibahas pemerintah dalam rentang waktu 3 bulan. Paling tidak awal Januari lah, karena kami sharing informasi dengan Bappenas dan Menkeu selama 3 hari. Karena pemerintah jujur saja di November dan Desember masih punya kebutuhan penerimaan negara sekitar Rp 500 triliun. Oleh karenanya, kita tidak akan mengganggu pemerintah," tutur Said.

Untuk Tambah Pegawai hingga Fasilitas

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajukan tambahan dana senilai Rp64,2 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2025 untuk menyerap pegawai baru.

"Kami mohon tambahan anggaran sebesar Rp64,2 miliar," kata Airlangga saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Senin (2/12/2024).

Ia menjelaskan estimasi belanja operasional pegawai pada pagu anggaran TA 2025 belum mencakup kebutuhan penerimaan aparatur sipil negara (ASN) 2025. Meski penerimaan dilakukan pada 2024, namun prosesnya bakal selesai pada TA 2025.

Sementara Kemenko Perekonomian rencananya akan merekrut 428 orang ASN baru untuk tahun depan, yang bakal disebar di Kemenko Perekonomian dan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Secara keseluruhan, pagu anggaran Kemenko Perekonomian TA 2025 yang telah disetujui DPR sebelumnya sebesar Rp459,76 miliar. Angka itu turun sebesar Rp64,2 miliar atau 12,25 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran TA 2024 senilai Rp524,04 miliar.

Anggaran Kemenko Perekonomian TA 2025 rencananya digunakan untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp165,93 miliar dan program dukungan manajemen Rp293,83 miliar.

Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025.

Sementara Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 273 miliar kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk Tahun Anggaran 2025. Tambahan anggaran tersebut untuk

memastikan kementerian bisa bekerja maksimal dalam satu tahun berjalan.

"Ya, tambahannya Rp 273 miliar. Jadi dari pagu yang ditetapkan sebelumnya Rp 230 miliar, ditambah dengan Rp 273 miliar, jadi kami berharap mendapatkan Rp 503 miliar," ujar AHY usai rapat kerja dengan Banggar DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

AHY mengatakan, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center dashboard serta belanja pegawai. Kemenko Infrastruktur, kata dia, memiliki kurang lebih 639 pegawai baik itu kategori PNS maupun non-PNS serta empat kedeputan.

Menurut AHY, para pegawai tersebut punya tugas dengan intensitas yang juga tinggi karena ada penekanan dari Presiden Prabowo Subianto, agar Kemenko Infrastruktur ini harus bisa mengintegrasikan sekaligus melakukan pengawasan yang baik.

"(Integrasi tersebut) agar semua infrastruktur bisa berdampak langsung pertumbuhan ekonomi secara nasional, serta peningkatan kesejahteraan termasuk pengentasan kemiskinan dan juga mengurangi ketimpangan antar wilayah," jelas AHY.

Sedangkan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar anggaran untuk kementeriannya ditambah. Tak tanggung-tanggung, Cak Imin meminta tambahan anggaran sebesar Rp653,7 miliar.

"Kemenko PM akan serius membangun ekosistem usaha masyarakat yang berkelanjutan dan mendorong graduasi dari kemiskinan," kata Cak Imin dalam rapat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Cak Imin merincikan anggaran yang dibutuhkan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dimulai dari anggaran untuk satu manajemen sebesar Rp119 miliar.

"Kemenko PM sendiri sebagai satu manajemen membutuhkan anggaran Rp119 miliar, hubungan manajemen dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan total Rp618 miliar," ungkapnya.

Kemudian, dia menyebut ada manajemen di dalam Kemenko PM yaitu Badan Percepatan Pengentasan Pemiskinan yang diketuai Budiman Sudjatmiko. Badan tersebut membutuhkan anggaran Rp125 miliar.

"Dalam koordinasi, Kemenko PM juga ada Dewan Jaminan Sosial Nasional, anggaran yang dibutuhkan Rp50 miliar," tutur dia. (wid, rls, ant/dya)

JAKARTA - Sebanyak 7 kementerian koordinator (Kemenko) dari Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran (TA) 2025 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Penambahan anggaran ini dibutuhkan karena adanya perubahan nomenklatur kementerian yang bertambah menjadi sebanyak 48 kementerian pada Kabinet Merah Putih.

Adapun rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) sebesar Rp 505,91 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko Pemberdayaan Masyarakat) sebesar Rp 653,77 miliar, dan Kementerian

Gaduh Kenaikan Gaji Guru

Istana Jelaskan Naik Rp 500 Ribu untuk Non-ASN Pemilik Sertifikasi Sebelum 2024

JAKARTA- Pidato Presiden Prabowo saat Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta Timur, Kamis, 28 November 2024 memicu kegaduhan. Saat itu Prabowo mengatakan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar satu kali gaji pokok. Selain itu, tunjangan profesi bagi guru non-ASN akan meningkat menjadi Rp 2 juta per bulan. Angka tersebut menimbulkan kerancuan pemahaman.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi akhirnya buka suara. Dia mengakui gaji guru Non-ASN yang memiliki sertifikasi sebelum tahun 2024 naik Rp 500 ribu sehingga menjadi Rp 2 juta.

Sementara, kata Hasan, guru yang baru mendapatkan sertifikasi pada 2024 akan langsung mendapatkan tambahan dari tunjangan sebesar Rp 2 juta pada 2025 mendatang.

"Kalau guru yang sudah punya sertifikat sebelum tahun 2024, ia kan memang sudah punya tunjangan guru non-ASN. Yang punya sertifikasi sebelum tahun 2024 kan memang sudah punya tunjangan Rp 1,5 juta. Nah, ia nanti pada tahun 2025 jadi Rp 2 juta," ujar Hasan, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

"Tapi guru non-ASN yang baru mendapatkan sertifikat di tahun 2024, ya kan, tahun 2024 ada sekitar Rp 600 ribu ASN maupun Non-ASN yang dapat sertifikat. Tahun 2025 nanti mereka langsung dapat tambahan dari tunjangan sebesar Rp 2 juta," tambahnya.

Maka, kata Hasan, guru Non-ASN yang baru mendapatkan sertifikat di tahun 2024 tak merintis dari Rp 1,5 juta dahulu tapi langsung menjadi Rp 2 juta.

Untuk guru ASN, Hasan membeberkan guru yang punya sertifikat sebelum 2024 memang sudah punya tunjangan sebesar satu kali gaji. "Guru ASN kan banyak, yang baru dapatkan sertifikat di tahun 2024 kan jumlahnya ratusan ribu. Nah mereka ini yang mendapatkan tambahan tunjangan sebesar satu kali gaji juga," ucapnya.

Hasan menegaskan yang perlu diingat adalah komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Presiden Prabowo Subianto sudah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non ASN menjadi Rp 81,6 triliun pada tahun 2025, atau naik sekitar Rp 16,7 triliun. "Jadi yang perlu diingat itu adalah komitmen pemerintah untuk



Siswa berbaris sambil menyalami gurunya saat perayaan Hari Guru di SMP Negeri 1 Denpasar, Senin (25/11/2024). (ist)

meningkatkan kesejahteraan guru dan tambahan dana kesejahteraan guru itu kan Rp 16,7 T. Ratusan ribu guru yang dapat peningkatan kesejahteraan dari sana," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji di Puncak Peringatan Hari Guru, Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024). Pengumuman ini disampaikan saat ia menyampaikan sambutan di hadapan ribuan para guru. Kepala Negara menuturkan, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta guru non-ASN atau honorer. Ia memerinci, kenaikan gaji sebesar satu kali gaji untuk guru ASN dan Rp 2 juta untuk guru non-ASN yang telah ikut sertifikasi/Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Memicu Multitafsir

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta pemerintah meluruskan pernyataan tentang kenaikan gaji guru. Menurut Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo, menaikkan gaji guru sebagaimana yang dijanjikan oleh Prabowo saat berkampanye adalah hal yang mustahil. Sebab, kata dia, tidak ada sumber dananya. "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita sudah minus karena harus membiaya makan bergizi gratis Rp 10.000 per siswa per hari," kata Heru dalam keterangan resminya pada Senin (2/11/2024).

Heru pun menilai ada kesalahan persepsi yang ditimbulkan oleh pidato Presiden Prwabowo, Pertama, menurut dia, tidak ada tambahan kesejahteraan maupun kenaikan gaji untuk guru ASN pada tahun 2025, karena sejak tahun 2008 pemerintah telah memberikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar 1 kali gaji pokok bagi guru ASN yang telah memperoleh

sertifikat pendidik.

Kedua, Heru menilai tidak ada peningkatan tunjangan profesi untuk guru non-ASN pada tahun 2025. Sebab, menurut dia, pada tahun-tahun sebelumnya sudah berlaku tunjangan profesi guru non-ASN sebesar Rp 1,5 juta. Heru menjelaskan tunjangan sebesar Rp 1,5 juta ini berlaku untuk guru yang belum mendapatkan Surat Keputusan Inpassing. Bagi guru yang sudah mendapatkan SK Inpassing, tunjangannya menjadi Rp 2 juta atau lebih sesuai golongan yang setara ASN.

Ketiga, Heru menyoroti rencana pemerintah untuk emबरikan bantuan kesejahteraan bagi guru honorer. "Hendaknya jangan berupa bantuan temporer seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) namun ditetapkan sesuai asta cita pak Prabowo berupa Upah Minimum Guru yang berlaku umum seperti Upah Minimum Regional tenaga kerja," ucap Heru. Oleh karena itu, kata Heru, FSGI mendesak pemerintah mengklarifikasi kebijakan kenaikan gaji guru.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) buka suara soal wacana kenaikan gaji guru bagi yang bersatus aparatur sipil negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun non-ASN. P2G ingin meminta klarifikasi pada Presiden Prabowo Subianto soal hal ini. "Nah ini menimbulkan multitafsir, menimbulkan harap-harap cemas, kegalauan dari para guru ASN khususnya," kata Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim.

Terkait hal ini, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, kenaikan gaji guru ini merupakan sesuatu yang sudah ditunggu sejak lama dan bisa dikatakan terlambat.

"Apa yang dilakukan merupakan upaya untuk memperlakukan para guru secara lebih fair, terutama terkait kesejahteraan mereka," kata Wijayanto, Senin (2/12/2024).

Rincian gaji guru PNS saat ini

- **Golongan I**
Golongan Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600
Golongan Ib: Rp1.840.800 - Rp3.670.700
Golongan Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700
Golongan Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400
- **Golongan II**
Golongan IIa: Rp2.184.000 - Rp3.643.400
Golongan IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500
Golongan IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200
Golongan IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600
- **Golongan III**
Golongan IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200
Golongan IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800
Golongan IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500
Golongan IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700
- **Golongan IV**
Golongan IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900
Golongan IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300
Golongan IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400
Golongan IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500
Golongan IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200

Rincian gaji guru PPPK saat ini:

- Golongan I: Rp1.938.500 - Rp2.900.900
- Golongan II: Rp2.116.900 - Rp3.071.200
- Golongan III: Rp2.206.500 - Rp3.201.200
- Golongan IV: Rp2.299.800 - Rp3.336.600
- Golongan V: Rp2.511.500 - Rp4.189.900
- Golongan VI: Rp2.742.800 - Rp4.367.100
- Golongan VII: Rp2.858.800 - Rp4.551.800
- Golongan VIII: Rp2.979.700 - Rp4.744.400
- Golongan IX: Rp3.203.600 - Rp5.261.500
- Golongan X: Rp3.339.100 - Rp5.484.000
- Golongan XI: Rp3.480.300 - Rp5.716.000
- Golongan XII: Rp3.627.500 - Rp5.957.800
- Golongan XIII: Rp3.781.000 - Rp6.209.800
- Golongan XIV: Rp3.940.900 - Rp6.472.500
- Golongan XV: Rp4.107.600 - Rp6.746.200
- Golongan XVI: Rp4.281.400 - Rp7.031.600
- Golongan XVII: Rp4.462.500 - Rp7.329.000

Wijayanto menambahkan kenaikan gaji ini belum memadai, karena belum menyentuh guru honorer, guru swasta yang belum bersertifikat, dan tenaga pendidikan non guru. Menurut Wijayanto, idealnya suatu saat nanti kesejahteraan mereka juga diperhatikan.

Terkait dampak kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Wijayanto menyebut tak kebijakan harus dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Dampak pada Anggaran Pemerintah Wijayanto menuturkan, kenaikan gaji untuk guru ini tentunya memiliki dampak bagi anggaran pemerintah, terutama di tengah situasi fiskal tanah air yang masih mengkhawatirkan.

"Dampak bagi anggaran pemerintah sekitar Rp 16,7 triliun, seperti disampaikan oleh Menteri. Nilai tersebut, kendati pun relatif tidak besar, tetapi sangat berdampak mengingat situasi fiskal kita di tahun 2024, 2025 dan 2026 masih sangat mengkhawatirkan," ujar dia. (wid, rls, ant/dya)

Resmi! DKPP Pecat Ketua KPU Jawa Barat

JAKARTA - Dewan Ke-hormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) member-hentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar), Ummi Wahyuni karena dianggap melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

"M e m u t u s k a n , mengabulkan permohonan pengadu untuk sebagian, menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua, teradu Ummi Wahyuni selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, terhitung sejak putusan ini dibacakan, kata Ketua DKPP Hedy Lukito di ruang sidang DKPP, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Kasus ini berasal dari aduan perkara nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Jumat (20/9/2024). Perkara ini diadakan Eep Hidayat. Ia mengadakan Ummi Wahyuni.

Dalam aduannya, Ummi didalilkan membiarkan dan mengamini pergeseran suara Partai NasDem atas nama Ujang Bey, Calon Anggota DPR RI nomor urut 5 Dapil Jawa Barat IX yang telah merugikan pengadu.

Sekretaris DKPP David Yama mengatakan, DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.

Hasil pemeriksaan DKPP, ditemukan ada pergeseran suara Partai NasDem kepada Ujang Bey. Ummi sudah dilaporkan mengenai masalah ini.

Akan tetapi, Ummi tidak memeriksa kembali dokumen yang diajukan sehingga membuat pengadu dirugikan,

"Sebelum penandatanganan berita acara, tidak ada upaya teradu untuk melakukan pengecekan dan memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen yang akan ditandatangani," kata Anggota DKPP Raka Sandi.

"Terungkap fakta formulir Pileg DPR yang ditandatangani teradu, ada perbedaan suara NasDem pada dapil IX untuk suara partai dan calon anggota nomor 5," kata Raka.

DKPP menilai Ummi telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. DKPP memerintahkan KPU RI segera menjalankan putusan ini dan Bawaslu untuk mengawasinya.

"Tiga, memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan," kata



Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni.

Hedy. "Empat, memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi putusan ini," tutup Hedy.

Ada Unsur Politis?

Pengamat politik dari Lembaga Studi Visi Nusantara, Yusuftriadi, menilai putusan DKPP yang memberhentikan Ketua KPU Jawa Barat dari jabatannya sarat dengan nuansa politis.

"Saya tidak terlalu faham amar keputusan DKPP terkait pemberhentian Ketua KPU Jawa Barat secara utuh. Begitupun kasus detailnya seperti apa sehingga DKPP harus memberikan sanksi pemberhentian kepada jabatan ketua KPU Jawa Barat," kata Yusuftriadi di

Cibinong, Senin (2/12/2024).

Dia menilai keputusan DKPP ini sangat janggal karena tidak ada tahapan keputusan seperti lazimnya dijatuhkan selama ini kepada para pelanggar etik.

"Seharusnya ada tahapannya seperti sanksi peringatan, peringatan keras, peringatan keras terakhir dan baru di akhir adalah pemberhentian," jelasnya.

Dengan tidak adanya tahapan sanksi tersebut, lanjut Yusuftriadi, maka keputusan DKPP terlihat terbang pilih dalam penegakan hukum etika Pemilu ini.

"DKPP juga tidak menjelaskan secara detail, kasus apa yang

sebenarnya terjadi. Oleh karena itu saya menduga sanksi pemberhentian ketua KPU Jabar dari jabatannya terkesan politis," imbuhnya.

Menurut Yusuftriadi, sangat mungkin ada unsur like and dislike (suka dan tidak suka) dalam memutuskan sanksi tersebut.

"Bisa jadi ada friksi diinternal kelembagaan KPU Jawa Barat sehingga ada upaya menjatuhkan Ummi Wahyuni sebagai Ketua KPU Jawa Barat," jelasnya.

Sinyalemen ini menguat karena pemberhentian ini terjadi di tengah tahapan Pilkada 2024 sedang berlangsung.

"Dengan berbagai kejanggalan tersebut, saya pikir sulit untuk bisa menyebutkan keputusan DKPP merupakan keputusan final dan mengikat," tambah Yusuftriadi.

Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang dirugikan atas keputusan DKPP ini, Yusuftriadi menyarankan untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).

"Sudah adan preseden di KPU RI dimana Komisioner KPU RI diberhentikan oleh DKPP namun ditolak oleh PTUN. Dengan demikian, putusan DKPP batal demi hukum," tandas Yusuftriadi. (wid, rls, ist/dya)

Perludem Temukan Politik Uang hingga Mobilisasi ASN di Pilkada 2024



(Ilustrasi) Aksi massa protes terkait maraknya politik uang dalam Pilkada 2024. (Ist)

JAKARTA, - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat empat temuan dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Pertama terkait dengan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan di beberapa daerah, khususnya yang didukung oleh Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo.

"Mobilisasi Aparatur Negara, masih menjadi salah satu pelanggaran paling menonjol di

Sumatera Utara dan Jawa Tengah," kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati dalam acara webinar, Senin (2/12/2024).

Dia mengatakan, beberapa kepala desa dan camat itu d i d u g a m e n g e r a h k a n w a r g a n y a u n t u k m e n d u k u n g kandidat tertentu, misalnya mengkoordinasikan dan membuat video. "Di Jawa Tengah juga ada praktik-praktik yang sama berdasarkan hasil wawancara dari tim pemantau kami," ucapnya.

Temuan kedua Perludem yakni dugaan intimidasi yang terjadi di daerah-daerah tertentu. Kasus paling besar adalah intimidasi yang sampai pada tindakan pidana terjadi di Sampang, Jawa Timur. Kemudian beberapa pengucilan di Sumatera

Utara.

"Ada soal intimidasi yang walaupun tidak masif, terjadinya di komunitas kecil, misalnya pengucilan warga yang berbeda pilihan politik atau ancaman halus dari pihak tertentu yang terjadi di Sumatera Utara," imbuhnya.

Temuan ketiga adalah politisasi bantuan sosial atau bansos. Meski tak semasif saat Pemilu 2024, Perludem mencatat beberapa pola politisasi bansos yang terjadi. "Terkait bansos ini misalnya ada pembagian bansos yang menggunakan simbol-simbol yang menjurus ini intensinya kepada salah satu paslon tertentu," imbuh dia.

Terakhir adalah politik uang yang besarnya variatif di Pilkada kali ini. Namun Perludem mencatat pola baru terkait politik uang seperti adanya pasar murah dan beragam cara lainnya. "Jadi misalnya paket sembako yang ada misalnya minyak goreng, itu yang dilakukan pilkada kali ini," tandasnya. (ist, rls, wid/dya)

90 Persen Bangunan Pasar Besar Bakal Dibongkar, Pemkot Kejar Finalisasi DED

MALANG - Rencana revitalisasi Pasar Besar Malang memasuki tahapan baru. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan 90 persen bangunan pasar tersebut akan dibongkar total, sesuai dengan standarisasi dari Kementerian PUPR RI.

Saat ini, Pemkot Malang tengah fokus mengejar finalisasi Detail Engineering Design (DED) sebagai salah satu syarat utama untuk merealisasikan bantuan senilai Rp 250 miliar dari pemerintah pusat.

"Awalnya kan kami mengajukan Rp 465 miliar, kemudian ada penyesuaian dari Kementerian PUPR, menjadi Rp 250 miliar. Ini mengikuti kriteria dan standarisasi dari kementerian PUPR yang harus kami taati, sehingga terjadi penyesuaian di dalam anggaran yang akan diberikan nanti," ujar Iwan, Senin (2/12/2024).

Iwan menjelaskan, penyesuaian anggaran tersebut juga berdampak langsung pada revisi Detail Engineering Design (DED) proyek revitalisasi pasar. Menurutnya, Pemkot Malang telah melakukan 3 kali pertemuan untuk membahas DED, termasuk menerima review dari Balai Prasaranan Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, yang memberikan sejumlah catatan penting.

"Dalam DED terakhir yang sedang

kami proses, ada beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan standar PUPR. Salah satunya adalah bangunan akan dirancang dengan kaidah green building, lengkap dengan tata ruang penghijauan agar lebih cerah, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli," tambahnya.

Iwan memastikan, sekitar 90 persen bangunan Pasar Besar akan dibongkar total untuk mendukung desain baru yang lebih modern dan ramah lingkungan. Meski demikian, ia menegaskan penyelesaian DED menjadi prioritas agar bantuan dari pemerintah pusat dapat segera dicairkan.

"Ini menjadi prioritas bagi kami. Kalau anggaran revitalisasi Pasar Besar Malang ingin dipenuhi dari APBN, maka semua persyaratan dari Kementerian PUPR harus kami lengkapi kompli," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mendorong Pemkot Malang untuk melakukan pendekatan persuasif kepada pedagang.

Pasalnya, selama beberapa tahun terakhir, rencana revitalisasi Pasar Besar Malang menuai pro dan kontra di kalangan pedagang. Beberapa pedagang merasa khawatir akan dampak relokasi sementara dan perubahan pasar yang akan datang.



Awalnya kan kami mengajukan Rp 465 miliar, kemudian ada penyesuaian dari Kementerian PUPR, menjadi Rp 250 miliar. Ini mengikuti kriteria dan standarisasi dari kementerian PUPR yang harus kami taati, sehingga terjadi penyesuaian di dalam anggaran yang akan diberikan nanti,

Iwan Kurniawan

Pj Wali Kota Malang,



Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia ini, menilai pendekatan yang baik dan komunikasi yang intensif dengan paguyuban pedagang sangat penting agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan resistensi dari masyarakat.

"Ya, dengan adanya penyesuaian ini, saya rasa Pemerintah Kota saat ini perlu melakukan pendekatan persuasif kepada paguyuban para pedagang, agar pelaksanaan

pembangunan bisa berjalan dengan lancar," tegasnya.

Mia juga menambahkan, DPRD Kota Malang telah menyetujui anggaran pendampingan sebesar Rp 10 miliar untuk mendukung relokasi pedagang selama proses revitalisasi berlangsung. Dana yang berasal dari APBD Kota Malang ini akan digunakan untuk memastikan pedagang tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi mereka di tempat lokasi sementara. (Santi/Dya)

Transaksi Bangsa E-Lokal Capai Rp 109 M, Kota Batu Genjot UMKM Lokal



Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai saat meninjau salah satu produk UMKM Lokal Kota Batu. (dok. Prokopim Kota Batu)

BATU - Program Bangsa E-Lokal inisiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mencatat transaksi mencapai Rp 109 miliar per Oktober 2024.

Guna mencapai target Rp 150 miliar di akhir tahun ini, Pemkot Batu berkomitmen untuk terus mengoptimalkan digitalisasi dalam memberdayakan UMKM lokal.

Sekaligus memperkuat ekonomi daerah dan mendorong daya saing produk-produk lokal di tingkat nasional.

"Saat ini transaksi dalam e-purchasing melalui Bangsa E-Lokal terus mengalami peningkatan. Sehingga membawa dampak yang signifikan untuk masyarakat Kota Wisata Batu, khususnya dalam menyerap produk lokal," ujar Kepala Bagian Belanja Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kota Batu, Dian Fachroni, Senin

(2/12/2024).

Dian menambahkan, dari total nilai transaksi Rp 109 miliar tersebut, Rp 101,4 miliar berasal dari belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Batu. Sementara itu, sekitar Rp 8,2 miliar berasal dari belanja pemerintah daerah lain serta lembaga kementerian, termasuk Kementerian

Agraria, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan.

"Ini menunjukkan bahwa produk lokal Kota Batu sudah menjadi pilihan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah dan kementerian. Artinya, Pemkot Batu juga turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Jadi kami berharap capaian ini dapat terus memotivasi kami untuk berinovasi dalam pelayanan publik," tambahnya.

Komitmen Pemkot Batu terhadap produk lokal juga terlihat dari nilai belanja melalui e-katalog yang mencapai Rp 75 miliar hingga semester Pertama 2024 ini. Angka tersebut membuat Pemkot optimistis dapat mencapai target transaksi Rp 150 miliar pada akhir tahun.

"Untuk mencapai target tersebut, kami terus mendorong belanja produk lokal melalui tagline 'Makin Lokal Makin Bangsa.' Hal ini tidak hanya mendukung UMKM lokal yang berdaya saing, tetapi juga memperkuat ketangguhan ekonomi daerah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Dian juga menyampaikan, keunggulan utama

program Bangsa E-Lokal terletak pada transparansi dan efisiensi proses pengadaan. Menurutnya, seluruh proses pengadaan dapat dipantau secara real-time, sehingga meminimalkan potensi praktik korupsi. Selain itu, proses yang cepat dan mudah juga memungkinkan penghematan waktu dan biaya.

"Setiap transaksi tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Justru melalui program ini, kami ingin memberikan wadah dan peluang besar bagi UMKM Kota Batu untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," jelas Dian.

Diakhir, Dian menegaskan Pemkot Batu akan terus meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Saat ini, program Bangsa E-Lokal juga tengah bersaing dalam Innovative Government Award (IGA) 2024 yang digelar Kemendagri RI. Diharapkannya, program ini semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Batu. (Santi/Dya)

Pesona dan Bakat Sydney Azkassyah Yusuf Ikuti Jejak Ibunya, Juara Gadis Sampul 2024

GADIS Sampul 2024 cukup disorot karena keikutsertaan beberapa anak artis, salah satunya Sydney yang berhasil menjadi pemenang. Sydney merupakan putri semata wayang Cut Tari. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, itulah yang menggambarkan prestasi Sydney Azkassyah Yusufs saat ini.

Pada 1991 silam, Cut Tari berhasil meraih juara kedua Gadis Sampul. Saat itu Cut Tari masih berusia 14 tahun dan menjadi wakil dari Jakarta. Kini 33 tahun berselang, Sydney Azkassyah Yusuf membuktikan kepiawaiannya dengan berhasil menjuarai Gadis Sampul 2024.

Prestasi tersebut disematkan dalam acara Gadis Sampul 2024 yang tayang di Vidio pada Sabtu (30/11/2024).

Remaja berusia 17 tahun tersebut mulanya masuk dalam 20 finalis terbaik Gadis Sampul 2024 layaknya sang ibunda yang mewakili wilayah Jakarta. Perjuangan Sidney berbuah manis setelah mengenakan "Tiara Puspa Gita" ajang Gadis Sampul 2024.

"Girls! Terjawab sudah ya, siapa yang beruntung mengenakan "Tiara

Puspa Gita" ajang GADIS SAMPUL 2024."

"Yes! GADIS dengan bangga mengumumkan Sydney Azkassya Yusuf sebagai Juara GADIS SAMPUL 2024!" tulis @gadismagz.

Cut Tari sendiri hadir langsung di dalam studio untuk mendukung sang putri. Cut Tari langsung disorot kamera setelah Sydney diumumkan menjadi juara pertama.

Sosok Sydney Azkassyah Yusuf

Sydney kelahiran Jakarta, tepatnya pada 10 Oktober 2007. Sydney Azkassyah Yusuf adalah putri semata wayang Cut Tari dari pernikahan pertamanya dengan Johannes Yusuf.

Meskipun telah menginjak usia remaja, Sydney tidak memperlihatkan kenakalan khas remaja pada umumnya. Bahkan, pembawaannya terlihat lebih tenang, dewasa, dan anggun untuk usianya.

Di usianya yang terbilang masih sangat belia, Sidney tercatat sebagai atlet gimnastik. Ia kerap bertanding di berbagai kejuaraan baik itu lokal maupun internasional. Gadis cantik ini pun kerap keluar sebagai juara.

Prestasi Sydney dalam olahraga senam lantai ini tentu mengundang decak kagum dari banyak orang. Karenanya, ia kerap diliput oleh berbagai media massa.

Januari 2019 silam, Sydney dan anak-anak artis yang berbakat lainnya pernah diundang oleh Deddy Corbuzier untuk hadir di program televisi Hitam Putih.

Sosok Sydney kini sudah beranjak dewasa dan makin mirip dengan sang ibunda. Bentuk mata dan senyum mereka pun sangatlah mirip.

Yang membedakan keduanya hanyalah polesan make-up yang dipakai oleh Cut Tari.

Setelah bercerai dengan Johannes Yusuf, Cut Tari kini telah menikah lagi dengan Richard Kevin yang ternyata memiliki dua anak.

Meskipun demikian, anak-anak Richard Kevin dan Cut Tari rupanya akur seperti saudara kandung. Dalam situs resmi Gadis Sampul, Sydney tercatat tengah mengenyam pendidikan di Mentari Intercultural Scholl Bintaro.

Sederet prestasi telah diraih Sydney sebelum menjadi juara Gadis Sampul 2024, di antaranya:

- Tim Atlet POPB (Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan) U-15 DKI JAKARTA (2019)

- 1st Place Artistic Gymnastic level 4 Gold Vitrigo International Cup Malaysia (2018)

- 1st Team, Moose Game Invitational Meet, Bangkok (2018)

- 1st Place Uneven Bars, Moose Game Invitational Meet, Bangkok (2018)- 1st Floor Sonnyty gymnastic club, Philippines (2016).

Cut Tari Sempat Khawatir Anaknya Terjun di Dunia Entertainment

Sebelumnya, Cut Tari mengaku tak ingin anak-anaknya terjun ke dunia entertainment. Bukan tanpa sebab, di era saat ini, Cut Tari khawatir anak-anaknya justru tidak kuat mental.

"Kalau aku pribadi kalau bisa nggak, gapapa, kenapa, karena jaman sekarang bukan kayak jaman dulu, jaman

sekarang jaman sosial media, nah anaknya kuat ga mentalnya," ujar Cut Tari ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Apalagi, sebagai publik figur beresiko mendapat kritik atau hujatan dari warganet.

"Karena kan publik figur atau dunia entertainment kita kembali lagi harus kuat mentalnya," kata Cut Tari.

"Dan banyak juga anak-anak muda suka lupa harus nguat mentalnya, kalau nggak kuat mentalnya kasihan," katanya lagi.

Kendati demikian, bukan berarti Cut Tari tak mengizinkan anak-anaknya itu terjun ke dunia entertainment. Ia mengizinkan apabila memang anaknya itu yang menginginkan.

"Saat ini kayaknya masih dilihat dulu bakatnya, ada nggak, kalau bisa nggak gapapa ya kan, tapi kalau memang ternyata bakatnya kenceng disitu, ya kita coba liat kedepannya," tutur Cut Tari.

Hanya saja, Cut Tari ingin anaknya saat ini untuk fokus pendidikan.

"Takutnya gini loh, kan nggak semua orang pintar bagi waktu, ada yang pintar, Desy Ratnasari pintar, cuma kan nggak semuanya, jadi mendingan satu-satu dulu lah," pungkasnya.

Adapun Cut Tari memiliki putri bernama Sydney Azkassyah serta kedua anak sambungnya yakni Chanella Leslie dan Richard Kingston.

Prestasi Sydney Azkassyah Yusuf

Sebelum mengikuti ajang Gadis Sampul 2024, Sydney putri Cut Tari telah dikenal akan prestasinya sebagai atlet. Sydney menjadi atlet gimnastik atau biasa disebut senam sejak masih anak-anak.

Tak main-main, prestasi Sydney bukan cuma di tingkat nasional, tetapi juga Internasional loh! Sebut saja kejuaraan Gymnastic di Filipina (2016), Hongkong (2017), Thailand (2018), dan Jakarta (2019), dan masih banyak lagi yang diikuti Sydney serta mendapat lebih dari satu medali.

Sedangkan prestasi yang diperoleh Sydney baru-baru ini adalah Gadis Sampul 2024. Sebagai pemenang, Sydney berhak mengenakan Tiara Puspa Gita dan mendapatkan beasiswa pendidikan sebesar Rp150 Juta.

Kemenangan Sydney berdasarkan penilaian juri Gadis Sampul 2024 yang terdiri dari Indri Wulandari, Astrid Tiar, Daffa Wardhana, Advina Ratnaningsih, Wita Juwita, dan Ratih Ibrahim dari 20 finalis Gadis Sampul



Kenali 9 Tanda-tanda Tubuh Overdosis Gula

TUBUH memerlukan gula tapi dalam jumlah yang aman. Mengonsumsi makanan manis yang berlebih tidak baik bagi kesehatan. Hal ini dapat meningkatkan kadar gula darah, yang bisa memicu kondisi hiperglikemia atau kelebihan kadar gula darah.

Jika kadar ini terus meningkat, risiko penyakit diabetes dan komplikasi lainnya akan semakin tinggi. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) bahkan sudah merekomendasikan batas maksimum konsumsi gula per hari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, Kemenkes RI merekomendasikan konsumsi gula sebanyak 10 persen dari total energi yang 200 kkal.

Lantas, apa saja tanda-tanda tubuh kelebihan gula?

1. Sering Haus dan Buang Air Kecil

Sering merasa haus dan buang air kecil adalah salah satu tanda umum tubuh mengandung terlalu banyak gula. Melansir dari Everyday Health, terlalu sering buang air kecil menandakan bahwa ginjal sudah "bekerja terlalu keras" untuk membuang kelebihan glukosa.

2. Mudah Lapar, tapi Berat Badan Menurun

Penderita gula darah tinggi cenderung sering mengalami lapar atau polifagia. Namun, catatan Cleveland Clinic menemukan bahwa penderita gula darah tinggi mengalami penurunan berat badan yang signifikan meskipun banyak makan.

"Hal ini disebabkan oleh tubuh yang tidak mendapat energi dari sumber yang diinginkan. Dengan demikian, energi beralih ke otot dan lemak," jelas Ahli Diet, Lori Zanini, beberapa waktu lalu.

"Saat tubuh mulai memecah otot dan lemak untuk menghasilkan energi, Anda mengalami penurunan berat badan

yang tidak sehat," imbuhnya.

3. Sering Kelelahan

Sering merasa lelah adalah salah satu tanda gula darah dalam tubuh tidak terkontrol.

"Sederhananya, ketika tubuh tidak memproses insulin dengan baik atau jumlah insulin tidak cukup, gula akan menetap di dalam darah dan tidak masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi," kata Zanini.

Selain perubahan berat badan dan nafsu makan, penderita gula darah tinggi cenderung sering mengalami lemah otot dan sering terjatuh.

4. Penglihatan Buram dan Sering Sakit Kepala

Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan pembengkakan lensa di mata akibat cairan bocor.

Pembengkakan lensa tersebut diklaim dapat mengubah bentuk lensa sehingga penglihatan buram dan sulit fokus. Selain itu, penderita kadar gula darah tinggi juga akan sering mengalami sakit kepala.

5. Luka di Kulit Sulit Sembuh atau Menghilang

Menurut NIDDK, luka; goresan; hingga memar pada penderita kadar gula darah tinggi akan lambat atau sulit sembuh. Sebab, diabetes yang merusak saraf dapat memengaruhi sirkulasi darah sehingga menunda penyembuhan luka akibat aliran darah tidak cukup.

Dalam beberapa kasus, luka ringan pada penderita diabetes lebih rentan terhadap infeksi. Akibatnya, luka ringan tersebut bisa meningkatkan risiko khaki diamputasi.

6. Kaki dan Tangan Sering Kesemutan

Gula darah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan saraf atau neuropati diabetik. Melansir dari Everyday Health, neuropati diabetik tersebut menimbulkan gejala berupa sensasi kesemutan atau bahkan mati rasa di kaki dan tangan.

Dalam beberapa kasus, penderita kadar gula tinggi juga sering mengalami nyeri kaki dan tangan, terutama pada malam hari.

7. Perubahan Kulit

Menurut American Diabetes Association (ADA), umumnya kulit penderita diabetes akan muncul

kutil. Selain itu, sejumlah area kulit, terutama di bagian belakang leher, tangan, ketiak, dan wajah juga akan menebal dan gelap. Zanini mengatakan, perubahan pada kulit tersebut bisa menjadi pertanda dari resistensi insulin dan peringatan kadar gula darah meningkat.

8. Sering Mengalami Infeksi Jamur

Menurut ADA, hiperglikemia dapat membuat para penderita diabetes rentan terkena infeksi jamur di area genital yang disebabkan oleh candida albicans. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), gejala infeksi jamur pada perempuan umumnya berupa vagina gatal, kemerahan atau nyeri, nyeri saat berhubungan seksual, nyeri saat buang air kecil, dan keputihan yang kental dan tidak normal.

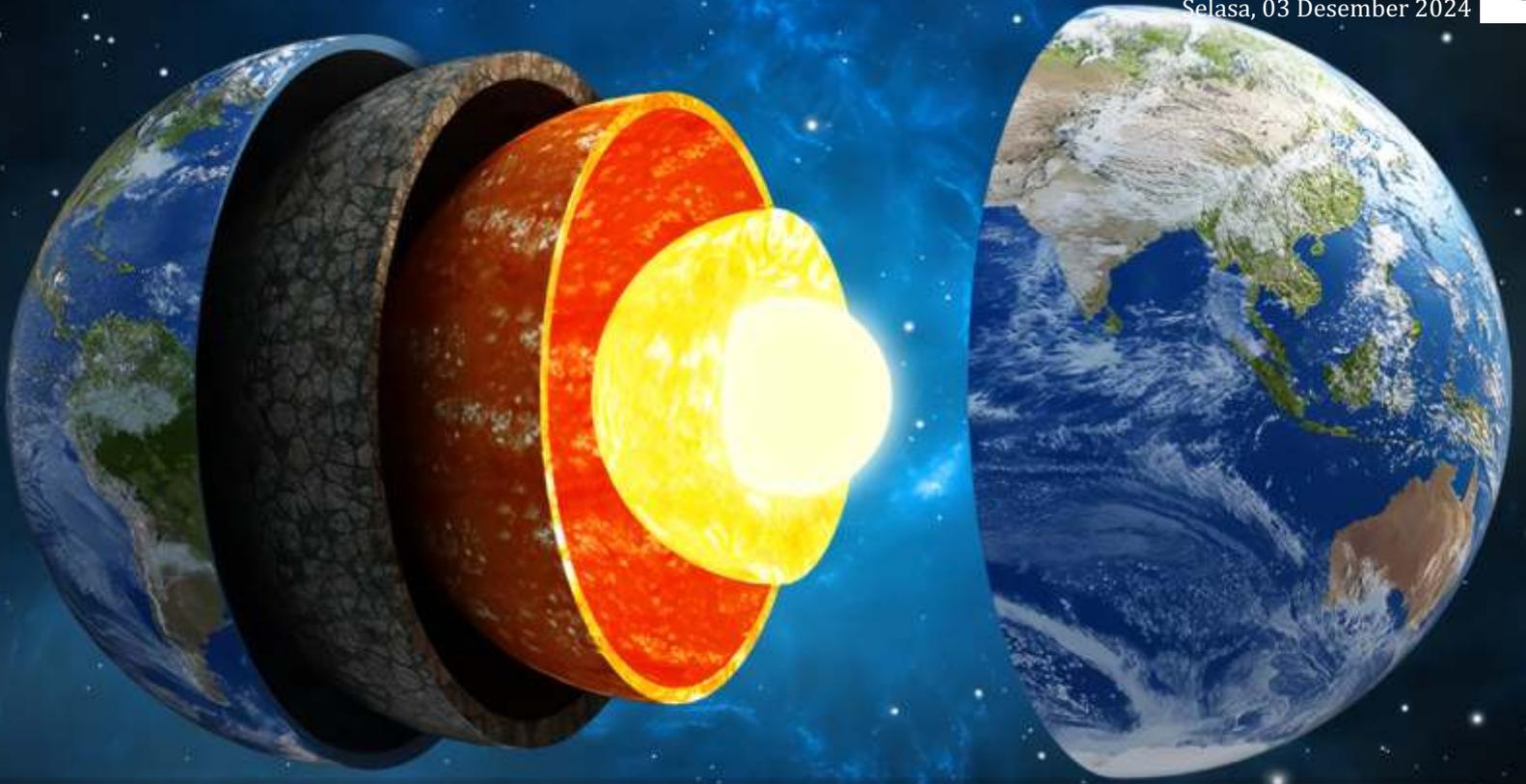
Meskipun infeksi jamur sering terjadi pada orang yang tidak menderita diabetes, memiliki lebih banyak glukosa dalam darah membuat Anda berisiko lebih tinggi terkena penyakit tersebut. "Ragi memakan glukosa, dan jika gula darah Anda tinggi, maka lebih banyak glukosa di saluran kemih," jelas Ahli Endokrinologi di MemorialCare South County Kidney and Endocrine Center, Rail Bandukwala.

9. Gusi Berdarah

NIDDK menyatakan bahwa penyakit gusi adalah salah satu bagian dari komplikasi diabetes yang membuat diabetes lebih sulit dikendalikan. Sebab, respons tubuh terhadap infeksi adalah melepaskan lebih banyak glukosa ke dalam aliran darah. Saat kadar gula tinggi, kandungan glukosa dalam air liur juga turut meningkat. Semakin banyak kandungan glukosa, semakin banyak pula bakteri yang bergabung dengan makanan di mulut untuk membentuk plak dan menyebabkan penyakit gusi.

Melansir dari Mayo Clinic, jika tidak diatasi, penyakit ini dapat berkembang menjadi periodontitis, (nei,ist/dya)





Misteri 2 Gumpalan Raksasa di Bawah Afrika dan Pasifik

SEKITAR 2.896 kilometer di bawah kerak Bumi, atau setara setengah perjalanan ke pusat Bumi, peneliti menemukan dua gumpalan raksasa misterius di kedua sisi planet secara berlawanan. Satu terletak di bawah Afrika, satu lagi di bawah tengah Samudra Pasifik.

Gumpalan tersebut secara teknis dikenal sebagai tumpukan termokimia atau dikenal large low shear velocity provinces (LLSVPs), wilayah seukuran benua yang secara fisik berbeda dari mantel bumi di sekitarnya.

Hasil pemindaian dengan jelas menunjukkan gumpalan tersebut ada di bawah benua Afrika dan Samudra Pasifik. Namun hanya sedikit yang diketahui ihwal seluk beluk struktur aneh ini.

Salah satu teori mengatakan bahwa gumpalan merupakan sisa-sisa

pembentukan Bumi 4,5 miliar tahun lalu. Jika itu benar, benda ini dapat memberikan wawasan luas tentang cara kerja kerak Bumi, serta sejarahnya yang kompleks.

"Sementara asal dan komposisi gumpalan belum diketahui. Kami menduga gumpalan ini menyimpan petunjuk penting tentang bagaimana Bumi terbentuk dan bagaimana Bumi bekerja saat ini," ujar Edward Garnero, ahli permukaan planet dan profesor di Arizona State University (ASU), sebagaimana dikutip IFL Science.

Garnero, bersama ahli geologi lain di ASU, menerbitkan tinjauan tentang gumpalan mantel raksasa pada 2016, dengan menggunakan data seismik, geokimia, dan fisika mineral. Meski mereka tidak menjelaskan asal-usul dan komposisi dari "anomalous provinces", artikel tersebut menyoroti

bagaimana benda tersebut mungkin memainkan peran dalam kekuatan geologis yang sangat dahsyat yang dilihat manusia di permukaan Bumi, seperti letusan gunung berapi, pergeseran lempengan tektonik, dan gempa bumi.

Banyak gunung berapi ditemukan di sepanjang tepi lempeng tektonik, muncul dari kedalaman Bumi saat batas-batasnya runtuh satu sama lain. Beberapa terbentuk oleh gumpalan mantel, kolom batuan panas yang muncul dari dalam mantel Bumi, mirip seperti gumpalan lilin yang mengapung ke atas lampu lava. Saat gumpalan mencapai kulit luar Bumi yang kaku, magma dapat terkumpul dan akhirnya menembus permukaan, membentuk gunung berapi.

Besar kemungkinan gumpalan raksasa dalam mantel di bawah Afrika dan Samudra Pasifik dapat menembus kerak dan menciptakan gunung berapi super besar yang bisa meletus selama jutaan tahun, meski ini sifatnya masih spekulatif karena hanya sedikit informasi yang diketahui tentang gumpalan tersebut.

"Jika seorang ahli saraf menemukan struktur yang tidak diketahui di otak manusia, seluruh komunitas ilmuwan otak, mulai dari psikolog hingga ahli bedah, akan secara aktif berupaya memahami peran dalam fungsi seluruh sistem," jelas Garnero.

"Seiring dengan semakin jelasnya fokus tumpukan termokimia, kami berharap ilmuwan Bumi lainnya akan mengeksplorasi bagaimana fitur-fitur ini cocok dengan teka-teki besar planet Bumi." (nei,ist/dya)



4 Inspirasi Outfit Warm Tone untuk Libur Natal dan Tahun Baru

MUSIM liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) sudah di depan mata. Tak ada salahnya untuk mempersiapkan outfit yang kece dan nyaman, khususnya untuk para pria. Tampil memukau di pesta tahun baru dapat menjadi pengalaman yang tak terlupakan.

Namun, dalam menyambut pesta sekali setahun tersebut, ada beberapa hal yang perlu disiapkan, salah satunya outfit terbaik.

Paduan warna warm tone yang hangat menjadikan warna tersebut sebagai tren dan cocok untuk outfit di musim libur Nataru. Selain nyaman, ini bisa jadi inspirasi untuk tetap stylish dan memesonakan.

Di momen jelang libur Nataru ini, desainer Indonesia, Tities Sapoeetra bersama MOC meluncurkan koleksi outfit terbaru dengan tema The Season of Style.

Inspirasi outfit tersebut

memadukan nuansa yang kasual namun tetap bisa di-mix and match sesuai kebutuhan dan pastinya cocok untuk Gen Z.

Penasaran, seperti apa inspirasi outfit dari koleksi terbaru Tities Sapoeetra dengan paduan warna hangat yang cocok untuk libur Nataru? Yuk simak inspirasinya:

1. Paduan Cardigan Knit

Inspirasi pertama ialah paduan cardigan knit yang hangat dan juga stylish. Nuansa warna coklat muda ini memberikan kesan simple dan kasual sehingga cocok untuk Gen Z tampil stylish saat libur Nataru.

"Pemilihan tema The Season of Style ini sangat cocok karena banyaknya event di akhir tahun yang membuat orang mesti tampil bergaya dengan bermacam-macam style." Ujar Tities Sapoeetra, belum lama ini.

Anda bisa memadukan cardigan

knit ini dengan t-shirt polos dan celana panjang dengan tone senada. Selain memberi tampilan kasual, tren cardigan knit ini juga sangat cocok dikenakan saat liburan Natal dan tahun baru.

2. Polo Shirt dengan Warna Terracota

Koleksi kali ini menghadirkan warna terracota dan coklat yang hangat sehingga cocok untuk momen libur Natal dan tahun baru yang identik dengan cuaca dingin.

Polo shirt dengan warna terracota ini bisa Anda gunakan untuk acara semi formal tapi tetap terlihat kasual. Warna ini juga memberikan nuansa hangat yang berkesan. Gaya simple tersebut terlihat timeless dan tetap kekinian.

3. T-Shirt Polos yang Kasual

Memadukan t-shirt yang simple

ternyata bisa bikin outfit Natal dan tahun baru Anda makin stylish dan kece maksimal!

Lewat koleksinya, Tities mengenakan t-shirt dengan aksesoris zipper di bagian tengahnya.

Masih dengan warna warm, t-shirt tersebut bisa Anda gunakan untuk acara formal maupun kasual. Dengan nuansa warm tone yang netral membuat t-shirt tersebut muda dipadukan dengan outfit lainnya.

4. Paduan Kemeja Flanel yang Formal

Satu lagi ialah paduan kemeja flanel yang bisa jadi inspirasi outfit Natal dan tahun baru. Nuansa terracota pada kemeja ini juga memberikan kesan Natal yang cerah dan berkesan. Anda bisa memadukan kemeja ini dengan kaos polos dan celana panjang berwarna netral sehingga terlihat tetap simple dan stylish.



Narasi 'Partai Cokelat'... (dari Hal 1)

ANGGOTA Fraksi PDI-P DPR RI Yulius Setiarto menegaskan bahwa dirinya tak menyebarkan fitnah atau hoaks terhadap institusi Polri melalui unggahannya yang menyinggung soal "partai coklat".

Hal itu disampaikan Yulius saat merespons pemanggilan dirinya ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR usai dilaporkan terkait unggahan tentang "partai coklat" di media sosial.

"Iya lah, saya ini bagaimanapun keluarga besar Polri. Adik saya itu yang menjadi polisi itu ada tiga, kakek saya itu polisi. Tidak mungkin saya akan melakukan fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar," ujar Yulius kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (2/12/2024).

Politikus PDI-P itu menegaskan bahwa dirinya justru meminta Polri memberikan klarifikasi atas isu "partai coklat" yang kerap dikaitkan dengan pelanggaran netralitas institusinya.

"Yang saya inginkan adalah klarifikasi, sehingga ada suatu ketegasan dari aparat pemerintah, dalam hal ini polri, Tentang berita-berita yang berseliweran seperti itu," kata Yulius.

Yulius menegaskan, bahwa pernyataannya bukan menyebut polisi cawe cawe di pilkada melainkan mengomentari video dari sebuah tayangan podcast 'bocoralus'.

"Iya dong. Kalau mau tanya tentang bukti adanya cawe-cawe baik institusi kepolisian dalam Pilkada kemarin bukan wilayah saya. Wilayah saya itu wilayah politik. Wilayah politik itu ada satu laporan, ada berita dari sebuah media itu saya sudah bisa ngomong. Itu saya sudah bisa berpendapat. Itu hak konstitusional sebagai anggota DPR dan ada imunitasnya," pungkasnya.

Terlepas dari hal itu, Yulius memastikan bahwa dirinya siap memberikan keterangan kepada MKD.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR telah memeriksa orang yang melaporkan anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Yulius Setiarto terkait ucapan Yulius soal "Partai Coklat".

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, TB Hasanuddin mengungkapkan, pelapor atas nama Ali Hakim Lubis telah menjalani pemeriksaan klarifikasi pada Senin (2/12/2024) pagi. "Sudah tadi pagi. (Atas nama) Pak Ali (Lubis)," ujar Hasanuddin saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta.

Hasanuddin mengatakan Yulius dilaporkan ke MKD soal pernyataannya di media sosial yang menyebut ada pengerahan partai coklat (parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada pilkada. "Dilaporkan oleh seseorang karena berbicara ke publik di media sosial yang mengatakan ada kecurangan

yang dilakukan oleh parcok. Konon disebut sebagai partai coklat," ujar dia.

Adapun Ali Lubis merupakan politikus Partai Gerindra. Ia juga masih menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Namun, menurut Hasanuddin, laporan Ali ke Yulius dibuat dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia.

"Kalau saya lihat dia warga biasa ya, warga biasa dari wilayah Bekasi. Saya tanya, apakah anda atas nama pemerintah? Bukan. Apakah anda atas nama polisi? Bukan. Apakah anda atas nama Pak Sigit? Bukan. Jadi beliau itu berbicara atas nama pribadi. Begitu yang saya tanya," ujarnya.

Dalam proses klarifikasi tadi pagi, Ali juga disebut melampirkan bukti berupa video yang diunggah Yulius dalam media sosialnya.

Menurutnya, MKD DPR bergerak melakukan klarifikasi untuk menindaklanjuti laporan yang dibuat masyarakat. "Tetapi ini ada pengaduan dari seseorang, ya sudah kita tadi meminta apa yang diadukan, kemudian besok kita akan meminta pernyataan apa yang disampaikan bapak-bapak," ujar dia.

Ditemui secara terpisah di DPR RI, Ali Lubis enggan memberi komentar saat dimintai keterangan soal pelaporan yang dibuatnya kepada Yulius.

Secara partai, PDI Perjuangan atau PDIP mengungkap dugaan ada pelibatan aparat Polri untuk memenangkan pasangan calon tertentu di sejumlah daerah pada pilkada 27 November 2024.

PDIP bahkan memberikan julukan partai coklat alias parcok pada masalah ini.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto secara tegas meminta kepada seluruh anggota Polri di Indonesia untuk bisa mengedepankan marwahnya dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Menurut Hasto, Polri tidak perlu menjadi alat bagi segelintir pihak dalam mewujudkan nafsu untuk berkuasa. "Dalam pilkada serentak ini, kami mempersoalkan tentang fenomena partai coklat, fenomena bagaimana Jokowi digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi, dan kemudian membuat suatu norma-norma baru sehingga Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdikan kepada Merah Putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktik banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis," kata Hasto saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Dalam momen tersebut, PDIP menampilkan foto mantan Kapolri, almarhum Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso.

Hoegeng merupakan salah satu

teladan Polri yang menjaga marwah Kepolisian, bukan justru terlibat dalam praktik politik.

"Karena itulah kami mengajak seluruh aparat Kepolisian Republik Indonesia, mari kita jaga spirit Polri Merah Putih, kita jaga seluruh keteladanan yang diberikan, seluruh kepercayaan rakyat-rakyat, mandat rakyat di dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum," kata Hasto.

"Ada tampilan bagaimana Jenderal Hoegeng yang menjadi panutan, beliau bukan politisi, beliau polisi. Polisi Merah Putih, bukan Parcok," sambungnya.

Hasto menyatakan, di beberapa wilayah dalam Pilkada 2024, parcok digerakkan secara masif. Atas hal itu, politikus asal Yogyakarta tersebut meminta kepada seluruh rakyat Indonesia agar dapat bersuara jika melihat masifnya pergerakan Polri di kontestasi Pemilu.

"Mari kita jaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita, keberanian kita untuk berbicara, sehingga Republik Indonesia yang dipertaruhkan dengan susah payah oleh pendiri Republik dapat tegak kokoh berdiri," kata Hasto.

Itu bukan kali pertama Hasto menyebut soal Parcok. Tudingan sama dilayangkan Hasto dalam sebuah Podcast Akbar Faizal Uncensored serta ketika usai mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menggunakan hak pilihnya di TPS 024, Jalan Kebagusan IV, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 November 2024.

Ketua DPP PDI-P, Djarot Saiful Hidayat, juga menyampaikan tudingan kemenangan Bobby disebabkan oleh penggunaan Parcok. Pihaknya mengungkapkan bahwa berbagai cara, termasuk kecurangan yang melibatkan Parcok digunakan untuk memenangkan Bobby.

Ditepis Wamendagri

Terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membantah dugaan keterlibatan polisi atau disimbolkan dengan 'Partai Cokelat' dalam proses Pilkada Serentak 2024.

"Kami tidak melihat pola yang terstruktur dan sistematis. Setiap aduan itu pasti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa," ujar Bima di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Bima membeberkan tidak pernah ada pola yang khas terkait aduan dugaan pelanggaran pilkada di setiap daerah. "Misalnya dari partai ini, kelompok ini. Tidak. Belum ada kami temukan pola yang khas, aduan yang seperti tadi."

Menurutnya, setiap daerah punya kasusnya masing-masing, baik dari ASN mengadukan politisi, petahana mengadukan penantang, dan sebagainya.

"Tidak ada pola tertentu dan setiap dugaan itu pasti harus

dibuktikan dengan data dan ditindaklanjuti dengan proses hukum," tegas dia.

Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI membenarkan bakal memanggil tiga anggota untuk dimintai klarifikasi, Selasa (3/12/2024). Adapun satu di antaranya adalah anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Haryanto soal dugaan video ekshibisionisme yang viral di media sosial.

"Nah, itu dia (Haryanto) kita panggil," kata Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam kepada wartawan, Senin (2/12/2024).

Dek Gam menyebut ada video tak senonoh yang viral terkait dengan Haryanto. MKD akan mengklarifikasi hal tersebut.

"Kan ada video itu, video seks itu kan, video call (video call sex/VCS - red) sama itu, saya sudah dapat videonya makanya kita mau klarifikasi," ucapnya.

Sebelumnya, MKD DPR RI didesak oleh publik untuk segera menindak mantan Bupati Pati, yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi PIDP, Haryanto karena diduga telah membuat video syur.

Video yang diisukan milik Haryanto itu diunggah oleh akun Instagram @azazeldiablos pada Senin (11/11/2024).

Dalam video tersebut, terlihat seorang laki-laki berkumis sedang berbaring di ranjang seorang diri sambil merekam wajahnya. Kemudian, kamera diarahkan ke area pinggang.

Rupanya, pria tersebut ingin menunjukkan alat kelaminnya ke arah kamera. Ia pun merekam diri sendiri sambil melakukan onani.

Video yang dibagikan akun anonim tersebut sudah disensor sehingga hanya terlihat wajah laki-laki yang mirip Haryanto saja. Selebihnya hanya tampak video yang diblur.

Akun itu juga mengunggah daftar anggota DPR dengan Dapil Jawa Tengah III. Salah satunya tertera nama Haryanto.

"Gila nih orang punya kelainan. Perwakilan ekshibisionis ada di Senayan. MKD @dpr_ri jangan tutup mata yah lihat persoalan ini," bunyi keterangan dalam caption. Ekshibisionis atau exhibitionist merupakan kelainan pada seseorang yang suke memamerkan alat kelamin ke publik.

"Anggota DPR RI Komisi V Dapil Jateng III Fraksi banteng bapak haji @haryantoshmmsi sekaligus mantan Bupati Pati Kabupaten Pati ini tolong segera diperiksa. Ini sudah termasuk asusila," imbuhnya..

Selain Haryanto, MKD juga akan memanggil anggota Fraksi PDIP yang lain, yakni Yulius Setiarto imbas pernyataannya soal netralitas Polri di Pilkada 2024. Direncanakan Yulius akan dipanggil pukul 14.30 WIB. (din, wid, rls, ant, ist/dya)

Misteri Angka Kenaikan Upah Minimum

Menko Airlangga Sebut Jumlah Inflasi Ditambah Pertumbuhan Ekonomi

UMP di 10 Provinsi dengan Kenaikan 6,5 Persen

DKI Jakarta

Rp 5.396.760,77

Papua Selatan

Rp 4.285.847,55

Papua Barat Daya

Rp 4.285.847,55

Papua Pegunungan

Rp 4.285.847,55

Papua Tengah

Rp 4.285.847,55

Papua

Rp 4.285.847,55

Bangka Belitung

Rp 3.876.600

Sulawesi Utara

Rp 3.775.425

Aceh

Rp 3.685.615

Sumatera Selatan

Rp 3.681.570



(Ilustrasi) Seorang pekerja saat mengikuti unjuk rasa kenaikan upah di Jakarta, Mei 2019. (GettyImage)

ditambah pertumbuhan ekonomi, maka perhitungan Upah Minimum 2025: $1,71\% + 4,95\% = 6,66\%$

Kenaikan upah minimum dengan menghitung inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi sama dengan aturan yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo pada 2015 lalu. Saat itu, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Pada intinya, Airlangga meminta agar pengusaha meniadakan kenaikan UMP yang sudah ditetapkan plus mengupayakan adanya kenaikan produktivitas.

"UMP itu pengusaha ya tentu harus meniadakan dan harus meningkatkan produktivitas," beber Airlangga.

Ditanya apakah sudah melakukan pembicaraan dengan pengusaha soal penetapan kenaikan UMP, Airlangga bilang sehari-hari kemarin saja dia sudah bertemu banyak pengusaha di agenda Rapimnas Kadin.

"Kemarin itu saya sehari-hari di Kadin, sudah saya perjelas," sebut Airlangga.

Namun, menurut Ketua Umum Afiliasi Global Ritel Indonesia (Agra) Roy N Mandey dalam penetapan UMP 2025 kurang mengakomodasi aspirasi pengusaha.

"Kami menyangkan mekanisme tripartit yang tidak optimal dalam pembahasan upah karena tidak melibatkan pengusaha secara aktif. Pembahasannya hanya pihak buruh yang banyak dilibatkan dan Kementerian Ketenagakerjaan," katanya, Senin (2/12/2024).

Roy bilang, pengumuman UMP 2025 langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ibarat sinetron saja. Yang mana, dari usulan menteri tenaga kerja upah minimum tahun depan naik sebesar 6%. Tapi oleh Presiden ditambah 0,5%, sehingga yang diumumkan 6,5%.

"Mungkin saja sudah direncanakan naik 6,5% karena Presiden Prabowo juga punya janji politik untuk menaikkan upah buruh. Tapi ini justru berpolemik karena mekanisme tripartit yang tak jalan,"

sebutnya.

Menurut Roy, kenaikan upah minimum yang terlampaui tinggi tidak menutup kemungkinan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi industri ritel yang tidak bisa memenuhinya. Memang ada pengecualian bagi pengusaha yang tidak bisa membayar UMP 2025 sesuai keputusan pemerintah bisa melapor dengan menaikkan upah sesuai kemampuan.

"Tapi dari permohonan itu, berapa banyak yang disetujui pemerintah. Yang pasti, menimbulkan polemik di internal perusahaan, Buruh pasti protes karena kenaikan upah tidak sesuai yang ditetapkan pemerintah," beber Penasehat Aprindo ini.

Di sisi lain, Roy tak memungkiri akibat kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi bisa berujung pada efisiensi dan pemutusan hubungan kerja. Yang terang, tujuan pemerintah menaikkan upah untuk mengungkit daya beli sepertinya akan sia-sia saja.

"Saat ini daya beli masyarakat memang menurun. Di sisi lain, harga-harga barang sudah naik sekitar 3%-4% lantaran isu kenaikan PPN jadi 12%. Kalau nanti PPN jadi naik, harga barang bisa naik sekitar 9%-12%," sebutnya.

Dalam kondisi harga konsumsi meningkat, daya beli turun, otomatis tingkat konsumsi juga tidak terungkit. Sebab, konsumen menahan belanja. Akibatnya, permintaan di ritel menjadi lesu. Sementara ongkos produksi trennya selalu meningkat. "Pengusaha juga sulit menaikkan omzet saat masyarakat menahan belanja," ujar Roy.

Dalam mengantisipasi kondisi demikian, Agra mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian soal penundaan kenaikan PPN menjadi 12%.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan pihaknya belum mendapatkan penjelasan komprehensif terkait metodologi perhitungan kenaikan UMP 2025, terutama apakah telah memperhitungkan variabel

produktivitas tenaga kerja, daya saing dunia usaha, dan kondisi ekonomi aktual.

Ada Potensi Ketidakpastian Hukum

Pakar Hukum Perburuhan Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati, menyinggung soal kemungkinan adanya ketidakpastian hukum ketika Prabowo Subianto menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5 persen. Sebabnya, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur soal formula perhitungan UMP.

"Yang saya khawatirkan adalah nanti akan muncul ketidakpastian hukum," kata Nabiyla Minggu (1/12/2024).

Ia melanjutkan, keputusan Prabowo menaikkan UMP 2025 tersebut bisa saja menjadi sengketa di kemudian hari. Menurut Nabiyla, bisa saja pihak pengusaha maupun buruh memperlakukan ketetapan pemerintah soal kenaikan UMP 6,5 persen karena menilai tidak ada dasar hukum yang mengikat dan menjadi dasar kenaikan tersebut. "Ketika sudah terjadi sengketa, artinya ada ketidakpastian hukum UMP mana yang akan berlangsung per Januari besok," ucap Nabiyla.

Hingga saat ini pemerintah belum membuat peraturan terbaru yang mengatur formula perhitungan UMP 2025. Hanya saja disebutkan bahwa formula perhitungan tersebut akan diatur lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

Menurut Nabiyla, adanya ketidakpastian hukum inilah yang membuat keputusan Prabowo menaikkan UMP sebesar 6,5 persen menjadi problematik. Ia menilai, seharusnya penetapan besar kenaikan UMP didasarkan pada formula perhitungan yang telah diatur lewat regulasi yang telah dirumuskan sebelumnya.

"Seharusnya kebijakan (permenaker) itu dibuat dulu, baru kemudian ketika kebijakan itu ada, lagi-lagi dihitung masing-masing kenaikan (UMP) di daerah," ujar dosen hukum ketenagakerjaan UGM tersebut.

Berbeda pendapat dengan Nabiyla, Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga, Hadi Subhan menilai keputusan Prabowo menaikkan UMP 2025 sebesar 6,5 persen menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya keputusan tersebut, kata Hadi, tiap-tiap daerah tidak akan asal menetapkan besaran kenaikan UMP.

"Justru yang ditetapkan presiden untuk kepastian hukum, agar masing-masing daerah tidak sekenanya sendiri menetapkan UMK atau UMP. Karena selama ini meski sudah ada formula, tapi hampir semua gubernur menyimpangi," kata Hadi. wid, ist, ant, rls/dya)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan menaikkan Upah Minimum (UM) 2025 sebesar 6,5%. Angka ini lebih besar dari yang diusulkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebesar 6%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun buka suara soal angka 6,5%. Menurut Airlangga, angka ini didapat dengan menjumlahkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Kan tadi saya sudah bilang pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ungkap Airlangga di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Merujuk apa yang disebutkan Airlangga dimana Upah Minimum 2025 naik 6,5% didapat dari inflasi